

ANALISIS MINAT PEMERINTAH DAERAH MENEMPATKAN DANA DAERAH PADA BANK SYARIAH

Muhamad Djedjen Syukrilah¹, Rully Trihantana², Ria Kusumaningrum³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹muhamad201420@gmail.com, ²rully.trihantana@febi-inais.ac.id,

³ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

The Regional Government of Pamijahan, Cibungbulang and Ciampea Districts, Bogor Regency, has an increasing desire to place its funds in sharia banks. Using descriptive quantitative research methods, and using multiple linear regression data analysis techniques, the research results show that the Regional Government Regulation variable has no effect on regional government interest in placing regional funds in Islamic banks. With a calculated T value of 3.747 > T table 2.04841 and a significance level of 0.002 < 0.05, the Regional Government of the sub-districts, namely Pamijahan, Cibungbulang, and Ciampea, Bogor Regency has an interest in placing regional funds in sharia banks, especially because of the Nisbah factor. Profit Sharing in Sharia Banks. The research results also show that simultaneously the variables Religiosity, Knowledge, Government Regulation, Promotion, Existence of Facilities, Administrative Costs, and Profit Sharing Ratio have a significant effect on the Regional Government's interest in placing regional funds in Islamic banks.

Keywords: Religiosity, Knowledge, Government Regulations, Existence of Facilities, Administrative Costs, Profit Sharing Ratio, Regional Government Interest.

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang, dan Ciampea Kabupaten Bogor memiliki keinginan yang semakin meningkat untuk menempatkan dananya pada Bank Syariah. Dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif, dan dengan teknik analisis data regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap minat Pemerintah Daerah dalam menempatkan dana daerah pada Bank Syariah. Dengan nilai T hitung sebesar 3,747 > sebesar T tabel 2,04841 dan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05, Pemerintah Daerah dari kecamatan yaitu Pamijahan, Cibungbulang, dan Ciampea Kabupaten Bogor memiliki minat untuk menempatkan dana daerah di Bank Syariah, terutama karena adanya faktor Nisbah Bagi Hasil di Bank Syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan variabel Religiusitas, Pengetahuan, Regulasi Pemerintah, Promosi, Keberadaan Fasilitas, Biaya Administrasi, dan Nisbah Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan

terhadap minat Pemerintah Daerah untuk menempatkan dana daerah di Bank Syariah.

Kata-kata Kunci: Religiusitas, Pengetahuan, Regulasi Pemerintah, Keberadaan Fasilitas, Biaya Administrasi, Nisbah Bagi Hasil, Minat Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN.

Masyarakat terutama yang hidup di perkotaan atau kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini masyarakat pedesaan pun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda krisis beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan bubarnya puluhan bank. Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari segi masyarakat ini baru sebatas dalam arti sempit. masyarakat mengenal bank masih sebatas tabungan dan kredit, selebihnya banyak tidak tahu, padahal begitu banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. masyarakat muslim Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980, sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 (Rahmanto, 2016:203).

Perekonomian di Indonesia terus berkembang. hal itu dapat di buktikan dengan berdirinya berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Berdirinya Lembaga keuangan syariah pertama kali di Indonesia

di mulai pada tahun 1992, yaitu dengan diresmikannya Bank mualamat sebagai Bank umum syariah pertama. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Bogor, setelah tahun 2000, Lembaga keuangan ini semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Ada beberapa jenis lembaga keuangan syariah bank dan non bank di Indonesia. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank diantaranya adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain-lain (Uniyanti, 2018:58).

Kehadiran Bank Syariah memperkuat peran serta industri perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional, sehingga perlu adanya pengembangan perbankan syariah untuk membentuk Bank Syariah yang kuat dan sehat serta berdaya saing tinggi. Namun, masih terdapat perbedaan antara bank yang murni syariah dengan bank konvensional yang berbasis syariah (Nasir et al.,

2016:302).

Bank merupakan suatu badan usaha yang sangat penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. apabila di lihat dari sejarahnya, kegiatan perbankan pada awalnya di mulai dari jasa penukaran uang. sistem Perbankan Syariah di Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara bersamaan yang dapat disebut dengan dual banking sistem.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah perbankan yang menerapkan sebagian prinsip ekonomi Islam. Bagian dari prinsip ekonomi Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah larangan adanya riba dalam berbagai bentuk. Tindakan yang dilakukan perbankan syariah untuk merealisasikan larangan riba yaitu dengan memberikan layanan bebas bunga kepada seluruh nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Hal ini karena bunga bank mempunyai sifat seperti riba berkenaan dengan hukum bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang hal tersebut.

Alasan utama menabung di Bank Syariah karena menjalankan syariah. Hal tersebut merupakan persepsi umum mengenai keputusan masyarakat untuk menabung di Bank Syariah. Tentunya ada faktor lain juga, dan hal itu menarik untuk ditelusuri juga dalam hal Pemerintah Daerah, terutama dalam lingkup kecamatan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam dengan judul “Analisis Minat Pemerintah Daerah untuk

Menempatkan Dana Daerah pada Bank Syariah” dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana minat Pemerintah Daerah untuk menempatkan dana nya di Bank Syariah. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian ialah Pemerintah Daerah Kecamatan Cibungbulang, Pamijahan, dan Ciampea Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Minat.

Pengertian Minat Minat (*interest*) berarti kecenderungan atau kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa adapaksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka atau senang dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut di peroleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran

mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam kondisi harmonis, agar kehendak dapat diatur dengan sebaik-baiknya (Uniyanti, 2018:56).

Menurut Mowen dalam Oliver (2006:211) minat beli merupakan sesuatu yang diperoleh dari proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Dimana nantinya minat beli membentuk suatu motivasi yang terus terekam dalam benak nasabah dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya itu. Kinnear dan Taylor (2003:90) berpendapat bahwa minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael,2001:223).

Mehta (1994:2) mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Percy dan Rossiter (1992) mengemukakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti

mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan (*influencer*), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. (Andespa, 2017:90)

II.2. Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan Pemerintah Daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan

- pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
 3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN (Sumber Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah).

II.3. Bank Syariah.

Pengertian Bank Syariah secara etimologi istilah bank berasal dari kata Italia Banco yang artinya (*Banku*). Banku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasional kepada para penabung secara terminologi. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka menaikan taraf hidup masyarakat (Mardani, 2015: 9).

Bank Syariah menurut Siamat Dahlan adalah Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasarkan ataupun memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist. Selain pendapat dari para ahli Bank Syariah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan Bank

Syariah dan unit usaha syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) (Adzikra, 2018:67). Seiring konsep syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassallam dan seiring perkembangan jaman dimasa kepemimpinan beliau terus berkembang mengenai Ekonomi Islam yang tumbuh sangat baik, setelah Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassallam wafat baru lah di masa Khalifah-khalifah berdirinyah Bank Syariah dengan sebutan Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah pertama yang menghimpun *funding* dan *lending* dengan sesuai prinsip-prinsip syariah, seiring juga dengan kemajuan jaman dan teknologi dan Ekonomi Islam menyebar luas di negara-negara di dunia. Pada tahun 1963 berdirilah Bank Syariah dengan sukses dan inovatif pada era modern yang awal kemunculanya di negara Mesir dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* yang diterima dengan baik oleh masyarakat pedesaan namun seiring jaman dan terjadi politik kekacauan di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran sehingga di ambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967.

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1999 dan 1998 maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya Bank Syariah Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999,

berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang negara, kemudian dikompersi menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah kedua di Indonesia. Bank umum syariah adalah Bank Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirinya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank Konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit usaha syariah. Contohnya unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah (Ismail 2011: 33).

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (Mardani, 2015: 25):

1. Riba, yaitu penambahan secara tidak sah (batil) antara lain transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman

karena berjalan waktu (nasi'ah).

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas dan tidak diketahui keberadaan atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Jenis Penelitian.

Jenis data yang akan penulis sajikan berbentuk data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data yang dapat dihitung. Metode ini dengan menggunakan teknik survey yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang di tetapkan. (Sugiyono, 2017, p. 7).

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peranan antara variabel independen yaitu faktor tingkat religiusitas, pengetahuan, regulasi pemerintah, proosi, keberadaan fasilitas, biaya administrasi dan nisbah bagi hasil serta variabel dependen adalah minat Pemerintah Daerah untuk menempatkan dana padabank syariah, dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*

yang dimana peneliti mengukur/mengobservasi data independen dan dependen hanya sekali dalam satu waktu dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan (Ismael 2011:67).

III.2. Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di tiga Kecamatan yaitu kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, pada 15 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021 dan diarahkan untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas. Penelitian ini khususnya diarahkan pada “Analisis Minat Pemerintah Daerah Untuk Menempatkan Dana Daerah Pada Bank Syariah”.

III.3. Jenis dan Sumber Data.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer.

Data primer data atau informasi yang menjadi sumber utama penelitian teknis dalam penelitian responden, sumber asli adalah bukti atau saksi tunggal dari suatu peristiwa yang telah terjadi, merupakan bukti asli dari data yang diperlukan tergantung dari jenis peneliti, sumber primer adalah suatu sumber data yang secara verbal memberikan data kepada pengumpulan data dan sumber sekunder adalah suatu sumber yang berasal dari penyediaan data secara verbal kepada pengumpul data, seperti melalui orang atau dokumen. Selain itu dilihat dari hal tersebut dapat dilakukan melalui observasi (observasi), wawancara (interview), dokumentasi dan studi pustaka

(Nazir, 2014: 39). Dalam penelitian ini di tunjukan untuk Lembaga Pemerintah (Desa).

2. Data Sekunder.

Data sekunder menurut (Sugiyono, 2016: 225) merupakan sumber penyediaan data tidak langsung untuk pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.

III.4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan untuk mendapat data untuk penelitian maka peneliti dapat menggunakan pengumpulan data interview (wawancara), kuesioner (angket) dan pengamatan (observasi) ataupun dengan (ketiganya) dari tiga diatas dalam penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) (Sugiyono, 2015:137). Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman dan Akbar, 2008: 41). Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menjeslaskan sedikit tentang jenis pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi.

Observasi merupakan tahap pertama dan penting dalam sebuah penelitian, dimana Observasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan sebelum memperoleh data yang lebih mendalam. Dengan melakukan pengamatan diharapkan peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung pada keadaan yang sebenarnya sesuai obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang minat Pemerintah Daerah (Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan

Ciampea) dalam menempatkan dana daerah pada Bank Syariah.

2. Kuisisioner.

Rancangan pertanyaan-pertanyaan yang akan di pecahkan, tiap-tiap pernyataan harus merupakan bagian dari hipotesa yang akan diuji dalam memperoleh keterangan yang yang berkisar tentang masalah apa yang ingin dipecahkan dalam sebuah peneliti. Dalam kuisisioner harus berisi tentang pernyataan tentang fakta dalam penelitian. pertanyaan tentang sebuah pendapat dan pernyataan tentang persepsi objek yang diteliti dan ditunjukkan kepada staff di tiga kecamatan itu yakni kecamatan Pamijahan, kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Ciampea.

III.5. Populasi.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari suatu objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2018: 130) Unit dalam penelitian ini adalah minat Pemerintah Daerah di 3 Kecamatan (Pamijahan, Cibungbulang dan Ciampea).

III.6. Sampel.

Sampel merupakan beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (sugiono, 2018: 131). Sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* nonprobability. Sampling adalah teknik pengumpulan sample yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota dalam membuat suatu sample. Dalam penelitian ini juga memakai teknik *Sampling Purposive* sampling purposive

adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018: 85).

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan pendekatan *Tabhacic & Fiedell*. Pengambilan sampel dengan teknik *Tabachic & Fiedell* (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini ada 7 variabel independen (variabel bebas). Dalam penelitian ini ada 3 populasi dari Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Ciampea dari setiap populasi ada 10 sampel yang di ambil sehingga total keseluruhan sampel menjadi 30 sampel. Telah diterangkan diatas bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teori deduktif. Dengan pengumpulan data melalui obsevasi dan kuisisioner dengan tambahan data sekunder, menggunakan statistik deskriptif untuk menguji data, menggunakan sampel penelitian.

III.7. Teknik Analisis Data.

Pengertian Analisis Data Menurut Moleong (2007). Definisi teknik analisis data ialah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari cacatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Analisis data adalah proses penerapan secara sistematis teknik statistik dan logis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, menyingkat dan merekap, serta mengevaluasi data.

Komponen penting untuk memastikan integritas data adalah analisis yang akurat dan sesuai dari temuan penelitian. Analisis statistik yang tidak tepat mendistorsi temuan ilmiah, menyesatkan pembaca biasa (Shepard, 2002:98). Dan dapat secara negatif mempengaruhi persepsi publik tentang penelitian. masalah integritas

juga relevan untuk Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.783 \geq 0,6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

III.8. Analisis Data Non-Statistik.

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian (Hayati, 2019:40)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Responden.

Tabel IV.1. Tabel Sebaran Responden.

Nomor	Kecamatan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Pamijahan	10	33 %
2	Cibungbulang	10	33 %
3	Ciampea	10	33 %
	Jumlah	30	99%

Berdasarkan tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa objek penelitian berdasarkan desa/kelurahan sebanyak 30 desa dan masing-masing desa diambil satu responden dengan jumlah 10 orang dan presentase (99%).

IV.2. Uji Instrumen.

IV.2.1. Uji Validitas.

Tabel IV.2.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Religiusitas (X1).

Indikator	CorrectedItem-Total Correlation	r table	Keterangan
P1	0,493	0.361	Valid
P2	0,573	0.361	Valid
P3	0,693	0.361	Valid
P4	0,706	0.361	Valid
P5	0,776	0.361	Valid
P6	0,785	0.361	Valid
P7	0,718	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Religiusitas dinyatakan valid.

Tabel IV.3. Tabel Hasil Uji Validitas pada Pengetahuan (X2).			
Indikator	CorrectedItem-Total Correlation	r table	Keterangan
P8	0,753	0.361	Valid
P9	0,641	0.361	Valid
P10	0,607	0.361	Valid
P11	0,709	0.361	Valid
P12	0,838	0.361	Valid
P13	0,725	0.361	Valid
P14	0,688	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Pengetahuan dinyatakan valid.

Tabel IV.4.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Regulasi Pemerintah (X3).

Indikator	CorrectedItem- Total Correlation	r table	Keterangan
P15	0,643	0.361	Valid
P16	0,431	0.361	Valid
P17	0,488	0.361	Valid
P18	0,771	0.361	Valid
P19	0,568	0.361	Valid
P20	0,438	0.361	Valid
P21	0,476	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Regulasi Pemerintah dinyatakan valid.

Tabel IV.5.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Promosi (X4).

Indikator	CorrectedItem- Total Correlation	r table	Keterangan
P22	0,618	0.361	Valid
P23	0,598	0.361	Valid
P24	0,752	0.361	Valid
P25	0,614	0.361	Valid
P26	0,806	0.361	Valid
P27	0,557	0.361	Valid
P28	0,618	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Promosi dinyatakan valid.

Tabel IV.6.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Keberadaan Fasilitas (X5).

Indikator	CorrectedItem- Total Correlation	r table	Keterangan
P29	0,414	0.361	Valid
P30	0,645	0.361	Valid
P31	0,698	0.361	Valid
P32	0,481	0.361	Valid
P33	0,788	0.361	Valid
P34	0,566	0.361	Valid
P35	0,622	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Keberadaan Fasilitas dinyatakan valid.

Tabel IV.7.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Biaya Administrasi (X6).

Indikator	CorrectedItem- Total Correlation	r table	Keterangan
P36	0,565	0.361	Valid
P37	0,451	0.361	Valid
P38	0,658	0.361	Valid
P39	0,868	0.361	Valid
P40	0,659	0.361	Valid
P41	0,871	0.361	Valid
P42	0,779	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Biaya Administrasi dinyatakan valid.

Tabel IV.8.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Nisbah Bagi Hasil (X7).

Indikator	CorrectedItem- Total Correlation	r table	Keterangan
P43	0,618	0.361	Valid
P44	0,719	0.361	Valid
P45	0,667	0.361	Valid
P46	0,691	0.361	Valid
P47	0,784	0.361	Valid
P48	0,639	0.361	Valid
P49	0,639	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Nisbah Bagi Hasil dinyatakan valid.

Tabel IV.9.
 Tabel Hasil Uji Validitas
 pada Minat Pemerintah Daerah (Y).

Indikator	CorrectedItem- Total Correlation	r table	Keterangan
PY50	0,850	0.361	Valid
PY51	0,768	0.361	Valid
PY52	0,748	0.361	Valid
PY53	0,755	0.361	Valid
PY54	0,726	0.361	Valid
PY55	0,595	0.361	Valid
PY56	0,710	0.361	Valid
TS	1,000	0.361	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Bahwa r tabel dalam penelitian ini 0.361 dan melihat kepada tabel validitas semuanya lebih besar dari r tabel sehingga Variabel Minat Pemerintah Daerah dinyatakan valid.

IV.2.2. Uji Reliabilitas.

Tabel IV.10.
 Tabel Hasil Uji Realibilitas
 pada Religiusitas (X1).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,780	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.780 \geq 0.6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.11.
 Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Pengetahuan (X2).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.752 \geq 0.6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.12.
 Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Regulasi Pemerintah (X3).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,783	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.783 \geq 0.6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.13.
 Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Promosi (X4).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,772	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.772 \geq 0,6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.14.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Keberadaan Fasilitas (X5).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.764 \geq 0,6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.15.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Biaya Administrasi (X6).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,782	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.782 \geq 0,6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.16.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Nisbah Bagi Hasil (X7).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,780	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.780 \geq 0,6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

Tabel IV.17.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas
 pada Minat Pemerintah Daerah (Y).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,790	8

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dikatakan bawa instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's $0.790 \geq 0,6$. Jadi instrumen penelitian dinyatakan dapat digunakan.

IV.3. Uji Asumsi Klasik.

IV.3.1 Uji Normalitas.

Tabel IV.18.

Tabel Hasil Uji Normalitas.

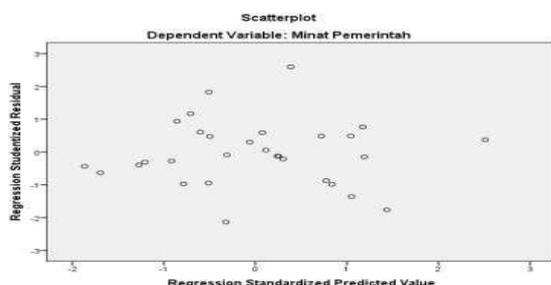
		Unstandardized Residual
N		30
	Mean	,0000000
Normal Parameters ^{a,b}		
	Std. Deviation	3,04363018
	Absolute	,109
Most Extreme Differences	Positive	,109
	Negative	-,101
Kolmogorov-		,599

Smirnov Z		
Asymp. Sig. (2-tailed)		,866

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,866. Oleh karena Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari penelitian ini (nilai penting > 0,05), maka data tersebut normal.

IV.3.2. Uji Heteroskedastisitas.



Gambar IV.1.

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebaran data residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar di bawah dan atas angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

IV.3.3. Uji Multikolinieritas.

Tabel IV.19.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas.

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zer-order	Parti-al	Part	Toleran-ce	VIF
(Constant)					
Religiusit	,254	,020	,01	,416	2,40

as			2		3
Pengetahu-an	,448	,173	,101	,276	3,623
Regulasi Pemerintah	,335	-,083	-,048	,375	2,668
1					
Promosi	,414	,236	,140	,384	2,608
Keberadaa-n Fasilitas	,652	,393	,247	,283	3,531
Biaya Administr-asi	,404	-,165	-,097	,333	3,004
Nisbah Bagi Hasil	,747	,624	,462	,576	1,735

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel religiusitas, pengetahuan, regulasi pemerintah, promosi, keberadaan fasilitas, biaya administrasi dan nisbah bagi hasil, kesemuanya memiliki nilai VIF kurang dari 10. Oleh karenanya tidak terjadi multikolinieritas.

IV.3.4. Uji Autokorelasi.

Tabel IV.20.

Tabel Hasil Uji Autokorelasi.

Mod-el	R	R Squa-re	Adjust-ed R Square	Std. Error of the Estima-te	Durbin-Watson
1	,816 ^a	,666	,559	3,49446	1,990

Sumber : Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin Watson menunjukkan angka 1,990 maka tidak ada autokorelasi dari semua variabel.

IV.4. Uji Hipotesis.

IV.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Tabel IV.21.

Tabel Hasil Regresi Linier Berganda.
 Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,194	3,876		,050	,960
Religiusitas	,320	,208	,218	1,196	,924
Pengetahuan	,207	,252	,193	1,023	,419
Regulasi Pemerintah	-,102	,262	-,079	-,391	,700
Promosi	,258	,227	,226	1,138	,268
Keberadaan Fasilitas	,564	,281	,464	2,004	,057
Biaya Administrasi	-,171	,218	-,168	-,786	,440
Nisbah Bagi Hasil	,659	,176	,608	3,747	,001

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

$$Y = \alpha + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7$$

$$Y = 0,194 - 0,320 (X1) + 0,207 (X2) + 0,102 (X3) + 0,258 (X4) + 0,564 (X5) - 0,171 (X6) + 0,659 (X7).$$

Keterangan:

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$,

Tingkat signifikansi $x = 30\%$.

Keterangan lainnya ialah:

1. Nilai konstanta atau $a = 0,194$ menunjukkan besarnya minat yang diberikan adalah 0,194 jika variabel Tingkat Religiusitas (X1), Pengetahuan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), Promosi (X4), Keberadaan Fasilitas (X5), Biaya administrasi (X6), Nisbah bagi hasil (X7) adalah 0.
2. Koefisien regresi variabel Religiusitas (X1) dengan nilai ,320 artinya jika nilai Tingkat Religiusitas naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar ,320.
3. Koefisien regresi variabel Pengetahuan (X2) dengan nilai ,207 artinya jika nilai harga naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar ,207.
4. Koefisien regresi variabel Regulasi Pemerintah (X3) dengan nilai - 0,102 artinya jika nilai keberadaan fasilitas naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar 0,102.
5. Koefisien regresi variabel promosi (X4) dengan nilai 0,258 artinya jika nilai promosi naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar 0,258.
6. Koefisien regresi variabel Keberadaan Fasilitas (X5) dengan nilai 0,564 artinya jika nilai religiusitas naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar 0,564.
7. Koefisien regresi variabel Biaya

administrasi (X6) dengan nilai - 0,171 artinya jika nilai pengetahuan naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar -0,171.

8. Koefisien regresi variabel Nisbah bagi hasil (X7) dengan nilai 0,659 artinya jika nilai Nisbah bagi hasil naik satu satuan, maka minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah naik sebesar 0,659.

IV.4.2. Uji Parsial (Uji t).

Tabel IV.22.

Tabel Hasil Uji Parsial.

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,194	3,876		,050	,960
Religiusitas	,320	,208	,218	1,196	,924
Pengetahuan	,207	,252	,193	1,023	,419
Regulasi Pemerintah	-,102	,262	-,079	-,391	,700
Promosi	,258	,227	,226	1,138	,268
Keberadaan Fasilitas	,564	,281	,464	2,004	,057
Biaya Administrasi	-,171	,218	-,168	-,786	,440
Nisbah Bagi Hasil	,659	,176	,608	3,747	,001

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel IV.21, pengaruh masing-masing variabel Religiusitas (X1), Pengetahuan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), Promosi (X4), Keberadaan Fasilitas (X5), Biaya administrasi (X6), Nisbah Bagi Hasil (X7) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung sebesar $,320 < t \text{ tabel sebesar } 2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,924 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah. Terdapat kesadaran bahwa sistem operasional yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Syariah juga memberikan kemudahan dalam menunaikan Zakat, Infak dan Sodaqoh. Banyak responden setuju menabung dan melakukan pembiayaan pada Bank Syariah terhindar dari praktik ribawi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung sebesar $0,258 < t \text{ tabel sebesar } 2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,419 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan berpengaruh positif. Banyak responden atau kepala desa yang paham terkait beberapa banyak produk-produk yang ada di Bank Syariah. Hal ini berpengaruh positif terhadap minat Pemerintah Daerah dalam menempatan dana daerah pada Bank Syariah.
3. Pengaruh Regulasi Pemerintah

terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung sebesar $-0,102 < t$ tabel sebesar $2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,700 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pemerintah berpengaruh negatif. Hal ini berarti bahwa keberadaan regulasi menjadi hambatan, atau dalam hal lain keberadaan regulasi tidak menjadi masalah sepanjang regulasi berubah untuk kemudahan penempatan dana daerah pada Bank Syariah.

4. Pengaruh Promosi terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung sebesar $0,258 < t$ tabel sebesar $2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,268 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Promosi berpengaruh positif terhadap minat Pemerintah Daerah dalam menempatkan dana daerah pada Bank Syariah. Banyak saran dari aparatur Pemerintah Daerah agar Bank Syariah meningkatkan promosi kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengaruh Keberadaan Fasilitas terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung sebesar $0,564 < t$ tabel sebesar $2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,057 > 0,10$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Keberadaan Fasilitas berpengaruh positif terhadap minat Pemerintah Daerah dalam menempatkan dana daerah pada Bank Syariah.
6. Pengaruh Biaya Administrasi terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung

sebesar $-0,171 < t$ tabel sebesar $2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,440 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Biaya Administrasi berpengaruh negatif terhadap minat Pemerintah Daerah dalam menempatkan dana daerah pada Bank Syariah. Artinya biaya administrasi perlu ditinjau dan dibandingkan dengan biaya administrasi pada Bank Syariah lainnya dan bank umum lainnya.

7. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah dengan nilai t hitung sebesar $0,659 < t$ tabel sebesar $2,04841$ dan tingkat signifikansi $0,001 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa variabel Nisbah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap minat Pemerintah Daerah dalam menempatkan dana daerah pada Bank Syariah karena menabung di Bank Syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil secara Syariat Islam.

IV.4.3. Uji Simultan (Uji F).

Tabel IV.23.
 Tabel Hasil Uji Simultan.

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	535,180	7	76,454	6,261	,000 ^b
Residual	268,647	22	12,211		
Total	803,827	29			

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $6,261$ dan F tabel sebesar $2,36$ dengan signifikansi F sebesar $0,000$

dengan probabilitas < 0.05 . Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel ($6,261 > 2,36$), dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan berarti bahwa Variabel Religiusitas, Pengetahuan, Regulasi Pemerintah, Promosi, Keberadaan Fasilitas, Biaya administrasi, Nisbah Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah. Pada taraf signifikansi 5%.

IV.4.4. Uji Koefisien Determinasi.

Tabel IV.24.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,816 ^a	,666	,559	3,49446	,666	6,261

Sumber: Pengolahan SPSS Statistics 21, 2022.

Pada tabel di atas menunjukkan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0,666 atau 66,6%. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 66,6% variabel Religiusitas, Pengetahuan, Regulasi Pemerintah, Promosi, Keberadaan Fasilitas, Biaya Administrasi, Nisbah Bagi Hasil (X7) menerangkan mengenai pengaruhnya terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah. Sisanya sebesar 33,4% yang mempengaruhi minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah, dipengaruhi faktor lainnya.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa dari 7 variabel independen yang digunakan yaitu Religiusitas (X1), Pengetahuan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), Promosi (X4), Keberadaan Fasilitas (X5), Biaya administrasi (X6), dan Nisbah Bagi Hasil (X7) hanya terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh yaitu Regulasi Pemerintah terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah.
2. Bahwa Variabel Religiusitas, Pengetahuan, Promosi, Keberadaan Fasilitas, Biaya administrasi, dan Nisbah Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Pemerintah Daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk Pemerintah Daerah ataupun Bank Syariah ialah:

1. Menambah intensitas dalam edukasi dan sosialisasi pemahaman minat menempatkan dana di Bank Syariah.
2. Pemerintah Daerah harus memprogramkan penempatan dana daerah pada Bank Syariah.
3. Perlunya regulasi yang mendorong pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam penempatan dana daerah pada Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Fitriani, Annisa. (2016). "Peran Religiusitas dalam Meningkatkan Psychological Well-Being." *Al-adyan Jurnal Studi Lintas Agama* 11(1).
- Ghozali. (2018). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25." *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun* 6(2).
- Mardani, (2015), *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Sofianti, V., Thantawi, T. R., & Mubarak, M. K. (2021). Analisis Manajemen Bisnis Syariah terhadap Program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Melindungi UMKM Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Sahid Business Journal*, 1(01), 104-114.
- Suganda, N., Trihantana, R., & Shiddieqy, H. A. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (Kspps Kums Bogor) Cabang Jonggol. *Sahid Business Journal*, 1(01), 130-143.
- Susilo, Endri. (2020). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)." Skripsi.
- Thantawi, T. R., Khoiri, A., Sakilah, I., & Imanudin, T. (2023). Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Sahid Business Journal*, 2(02), 99-108.
- Trihantana, R., & Alhifni, A. (2017). Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS di Wilayah Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Zuhirsyan, Muhammad, dan Nurlinda. (2018). "Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah." *Al-amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10(1). Doi: 10.24235/amwal.v10i1.2812.